

OMBUDSMAN KALSEL, TEKANKAN URGENSI PENGELOLAAN PENGADUAN DALAM FORUM KONSULTASI PUBLIK DISDUKCAPIL

Jum'at, 01 November 2024 - kalsel

Banjarmasin-Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyampaikan pentingnya komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui tata kelola pengaduan pelayanan internal, dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bertempat di Galaxy Hotel Kota Banjarmasin, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Tapin, Sekretaris Daerah, Perwakilan Media, Perwakilan Masyarakat Disabilitas, Akademisi, serta tokoh masyarakat, Jumat (01/11/2024).

Pj Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas, merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk terus meningkatkannya, serta merupakan hak bagi masyarakat untuk mengakses dan mendapatkannya. "Selain memberikan pelayanan berkualitas, kita tidak boleh abai terhadap saran masukan termasuk pengaduan yang disampaikan masyarakat," kata M Syarifuddin.

Menyambung, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman, menyampaikan pentingnya upaya pencegahan terhadap maladministrasi dan penjelasan beragam bentuknya, serta komitmen pelayanan prima melalui sistem pengelolaan pengaduan layanan publik internal. "Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, adalah pelayanan yang terselenggara dengan partisipatif masyarakat, adapun pengaduan maupun saran masukan yang disampaikan masyarakat merupakan sarana evaluasi bagi penyelenggara untuk berbenah, memperbaiki atau meningkatkan pelayanan agar lebih baik," kata Hadi Rahman.

Selain itu, turut disampaikan oleh Hadi Rahman, terkait evaluasi sistem pengelolaan pengaduan dalam dimensi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI. "Terkadang tugas sebagai pengelola pengaduan hanya dianggap sebagai tugas tambahan, sehingga tidak ada pembinaan maupun upaya peningkatan kompetensi terhadap petugas pengelola pengaduan, kami harap dimulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, pelatihan dan pembimbingan bagi petugas pengelola pengaduan dilaksanakan," kata Hadi Rahman.